



Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Bone

Government's Strategy In The Development Of The Capacity Of The Education Program Free Of Education In The District Bone

Hafsa Sadia*; Nuryanti Mustari; St. Nurmaeta; Fitri Sari Handayani Razak

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
andihafsa702712@gmail.com

Kata Kunci: Key Word:

kapasitas;
pendidikan gratis;
strategi;

strategy;
education free;
capacity;

ABSTRAK/ ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki dengan mengumpulkan data untuk di analisis. Lokasi penelitian berdasarkan pada judul yaitu di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam kapasitas pendidikan gratis di Kabupaten Bone berjalan dengan baik dan hal yang menjadi pendukung strategi pendidikan gratis ini ialah pihak yang terkait dalam hal ini menjalin kerjasama yang baik dalam hal strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas serta sumber daya yang memadai dalam menjalankan program pendidikan gratis.

This study aims to obtain a picture of the government's strategy in the development of the capacity of the education program free of education in the district Bone and factors that influence the government's strategy in the development of the capacity of the education program free in the district Bone south Sulawesi education. The research used is the research kualitatif is one of the type of the study aims to provide a picture or painting in a systemetis way, faktual issues and accurate about the object in vestigated by collecting data to in analisis. The research based on the title that in the district office education Bone. The results of research on the show that the government's strategy in the development of the capacity of the education program free in the district Bone, go well and things to support a strategi of education free this is the parties in involved in this in collaboration both in terms of the government's startegy in the development of the capacity as well as the resources adequate in running the education program free.

PENDAHULUAN

Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) dihadapi dan yang akan mungkin di masa depan, guna mencapai efektifitas.

Berdasarkan substansi pasal tersebut jelas bahwa peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbentuk pembinaan dan fasilitasi pada 3 (tiga) aspek yakni kerangka kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, telah banyak pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga internasional.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan *capacity building* dengan tujuan memperbaiki dan memperbarui sistem yang ada agar lebih dari sebelumnya. Berdasarkan PP No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone yang merupakan institusi pemerintahan daerah juga melaksanakan pengembangan kapasitas khususnya pengembangan kapasitas kelembagaan.. Di mana dalam hal ini, fokus dari pengembangan kapasitas ini di lakukan dengan cara melakukan ingkauan sistem yaitu ingkatan istem (kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan).

Kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah merupakan kebijakan publik desentralisasi (UU 32 Tahun 2004) di mana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan sesuai kebijakan pendidikan nasional (UU No 20 Tahun 2003). Apalagi bila Mendiskusikan pendidikan dalam ranah kebijakan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat (Harakan, 2017).

Sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional ada dua hal khusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana pendidikan baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 (4), kedua UU No 20 Tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerinah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga negara

Program Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana dengan adanya program pendidikan gratis tapi tidak berarti bahwa semuanya gratis, seperti seragam sekolah dan buku penunjang dan biaya transportasi masih tanggungan orang tua dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Biaya untuk memenuhi kebijakan 'pendidikan gratis' adalah berupa subsidi. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya komitmen dan perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Selain itu khusus di Indonesia, isu sentral yang berkembang dewasa ini dalam bidang pendidikan adalah masalah rendahnya mutu pendidikan (Mustari, 2011).

Pemerintah seharusnya dengan sungguh-sungguh melaksanakan langkah strategisnya yang menitikberatkan pada 3 hal pokok yaitu : Pertama peningkatan pemerataan dan akses pendidikan seluas-luasnya. Kedua, peningkatan mutu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, peningkatan tersebut adalah pelayanan publik dalam bidang pendidikan.. Pemerintah juga seharusnya bekerjasama sesuai pihak yang terkait dengan kebijakan dan aturan pendidikan gratis, dan adapun faktor pendukung dan penghambat program pendidikan gratis faktor pendukung yang pertama sarana dan prasarana yang ke dua memiliki sumber daya biaya sedangkan faktor penghambat adalah fakor komunikasi.

Berkaitan dengan hal di atas, akuntabilitas (pertanggungjawaban) penyelenggaraan program pendidikan gratis sangat penting bagi semua masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat masih menganggap bahwa program pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone masih kurang memuaskan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone".

METODE

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menggambarkan secara detail masalah yang akan diteliti yang didapatkan langsung dilapangan sesuai keadaan objek yang diteliti. Waktu pelaksanaan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal. Penelitian dilakukan di kabupaten Bone dengan lokasi penelitian

dilaksanakan pada kantor Dinas Pendidikan kabupaten Bone dengan dasar pertimbangan karena sesuai dengan objek masalah yang akan diteliti dan sebagai pelaksana dari program pendidikan gratis di kabupten Bone. . penguatan data berdasarkan hasil observasi di lapangan, wawancara dengan 7 narasumber sebagai penguatan hasil penelitian dan studi kasus dengan mengambil bukti-bukti terkait penelitian yang berbentuk literasi.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Strategi pemerinah hanya dapat tercapai apabila di peroleh manfaat yang terlibat didalamnya. Apabila ada pihak yang dirugikan tentang program pendidikan gratis maka strategi tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari strategi pemerintah pada program pendidikan gratis Riyadi Soeprapto.

Ada 3 indikator untuk melihat keberhasilan tersebut anatara lain sebagai berikut: peningkatan pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

a. Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan

Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam suatu kebijakan publik maka harus dilaksanakan dengan perencanaan berkaitan dengan persoalan peningkatan pemerataan dan akses pendidikan maka pelaksanaan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerinah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan UU 1945 yakni "...Mencerdaskan kehidupan bangsa"

Secara nasional pemerinah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan peningkaan pemerataan dan akses pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), dan anggararan pendapatan belanja desa (APBD)membebaskan biaya SD hingga SMA. Upaya-upaya pemerintah tersebut masih di anggap belum maksimal oleh masyarakat.

Menurut Kotler (2011:25) Strategi pemerintah adalah proses untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan pemerintah dan peluang besar yang terus berubah, dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha pemerintah dan produk yang dihasilkan sehingga bisa mencapai tingkat perubahan.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pendidikan anak di Indonesia senantiasa dilakukan dengan mengutamakan pendidikan sebagai program kerja utama pemerintah . mengingat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan tujuan dari bangsa Indonesia adalah "... mencerdaskan kehidupan bangsa". Strategi pemerintah adalah menghubungkan antara pemerataan dan akses pendidikan pada sektor pendidikan dengan aturan pemerintah daerah yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji literatur mengenai pemerataan strategi dan konsep akses pendidikan pada strategi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pendidikan. Pemerintah setelah itu akan diuraikan alternatif pendekatan dalam peningkatan strategi yang mungkin dapat diterapkan pada pemerintah.

Menurut Hindri Asmoko (2010:45) strategi pemerintah adalah menghubungkan antara konsep manajemen strategi pada sektor privat dengan aturan pengelolaan pemerintah daerah yang ada dalam perundang-undangandi Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji literatur mengenai manajemen strategi dan konsep manajemen strategi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengelolaan pemerintah. Setelah itu akan diuraikan alternatif pendekatan dalam manajemen strategi yang mungkin dapat diterapkan pada pemerintah di Indonesia.

b. Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu merupakan suatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Di perlukan peningkatan dan perubahan keterampilan tenaga kerja, proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan agar dapa memenuhi dan melebihi harapan masyarakat.

Dalam pandangan Arief (2010;2) dikatakan bahwa peningkatan mutu adalah suau proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tujuan agar menjadi target pendidikan dapat dicapai dengan lebih efisien dan efektif.

Untuk meningkakan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi telah banyak pakar pendidikan mengutarakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah pendidikan tak berdiam diri sehingga tujuan pendidikan gratis dapat

terlaksana dengan baik. Menurut Brown (2010:25) capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, faktor kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, strategi dan pendekatan pendidikan yang modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional. Sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih pengetahuan dan profesional. Dwiyanto (2010:3).

Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara khusus faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Nurhayati, 2010:3)

Strategi dapat dijadikan sebagai 4P, yaitu strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan dan strategi sebagai pola kegiatan. Sebagai perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi organisasi. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola yaitu umpan balik dan penyesuaian. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Rangkuti (2012:21) strategi pemerintah adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar pemerintah dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Pengertian strategi pengembangan kapasitas memang secara terminologi masih ada perbedaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku.

Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai capacity development atau capacity strengthening, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (existing capacity).

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pemerintah sangat berperan penting. Salah satu usaha pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia dengan pengambilan keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan UUD yang berlaku. Dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan. Masyarakat mempunyai peran penting dalam usaha peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan.

Masyarakat melakukan peran sosial untuk memberikan kontribusi dengan berbagai kesanggupan atau potensi yang dimilikinya. Di dalam masyarakat terdapat beberapa komponen yaitu tokoh masyarakat, masyarakat dengan berbagai potensinya, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Semuanya itu harus melakukan fungsi pemberdayaan sosial agar dapat memajukan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik. Tingkat pendidikan masyarakat di harapkan dapat tuntas 9 tahun menuju pola pendidikan 12 tahun. Hal ini senada dengan kebutuhan dan daya saing internasional dengan berbagai keunggulan. Sebagai komponen masyarakat harus mampu melakukan pemberdayaan sosial yang unggul. Masyarakat merupakan subjek dan objek dari pelaksana program pendidikan gratis, oleh karena itu masyarakat harus melakukan pemberdayaan masyarakat untuk membantu pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk masyarakat harus menjadi agent of change untuk pembangunan masyarakat sosial. Program pendidikan gratis ini sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk menyederhanakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kebijakan ini tentunya sangat membantu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan bidang pendidikan. Pemerataan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Dari berbagai pengertian tentang Good Governance dapat disimpulkan bahwa suatu konsep

tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan.

Dalam Buku *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance* yang ditulis oleh Riyadi Soeprapto, juga menyampaikan bahwa World Bank menekankan perhatian capacity building pada:

Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis

Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen

Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal,

Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran.

Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor- faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan di berbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya.

Tingkatan Pengembangan Kapasitas

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan menurut Riyadi Soeprapto, yaitu sebagaimana diilustrasikan dengan tingkatan sistem dengan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan yang ada pada program pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 1 (satu) tingkatan yaitu:

Tingkatan sistem, seperti kerangka kerjayang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaianobyektivitas kebijakan tertentu.

Tujuan-pengembangan-kapasitas

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut.Sedangkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, tidak ada tujuan lain selain untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance. Suatu kondisi pemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak yang mampu.

Sasaran Pengembangan Kapasitas

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan good governance, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar good governance itu sendiri. Menurut Morison (2010:42) Peningkatan kapasitas dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah program pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone.

Tidak ada alasan mendasar memang untuk menolak itikad baik pemerintah ini, hanya saja banyak yang perlu di tinjau ulang, Pemerintah meninjau hal teknis, dan para pendidik pun meninjau kedalam hati mereka, jangan sampai imbas dari pendidikan gratis ini membuat kualitas pendidikan semakin terpuruk, lalu mau jadi apa

generasi kita yang akan datang yang menjadi masalah selama ini, mutu pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari harapan banyak pihak.

Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana siswa tidak lagi dibebankan dengan biaya fungsional. Seperti baju seragam, uang transportasi dan buku penunjang utama masih tanggungan orang tua siswa. Dan untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemerintah. Pendidikan merupakan suatu wahana di mana kita dapat mengetahui berbagai ilmu pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, sehingga kita dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berfikir untuk jangka panjang dan cerdas membangun bangsa. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkannya memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi dan fenomena yang terjadi di masyarakatnya.

Adapun beberapa faktor pendukung dalam strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Sarana dan prasarana konsekuensi dari penerapan pendidikan gratis tidak hanya berorientasi kepada anggaran gratis semata. Pemerintah setempat tetap memperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Memiliki sumber daya biaya yang cukup untuk membantu menjalankan program pendidikan gratis, pendidikan gratis ini yaitu sumber daya manusia dalam hal ini masih banyak terdapat tenaga bantu pada setiap sekolah.

b. Faktor penghambat

Dalam hal ini dapat juga digambarkan faktor penghambat yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gratis di dinas pendidikan Kabupaten Bone adalah:

Faktor komunikasi yang tentunya telah memberikan pengaruh terhadap sekolah sebagai pelaksana kebijakan dimana peraturan daerah yang menjadi pedoman teknis kebijakan tersebut, dan sumber daya yang terkait langsung dalam kebijakan ini merupakan tanggung jawab terhadap strategi program pendidikan gratis pemerintah mengatur pengeluaran anggaran tersebut.

Dari hasil penelitian yang di dapat oleh penulis di lapangan tentang program pendidikan gratis walaupun masyarakat belum puas dengan adanya pendidikan gratis. Tpi masyarakat bersyukur karna tidak lagi di bebaskan uang masuk sekolah. Jadi

masyarakat berantusias untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, supaya anak mereka tidak lagi keterbelakangan dalam hal pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan startegi pemerintah dalam pengembangan kapasitas program pendidikan gartis di dinas pendidikan Kabupaten Bone maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Peningkatan Pemerataan dan akses pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerinah Pusat dan Daerah secara komprehensip guna mewujudkan UU 1945 yakni "...Mencerdaskan kehidupan bangsa"

Peningkatan sumber daya alam bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat sebagai peserta didik dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu yang menjadi pendukung ialah pihak yang terkait dalam hal ini yang menjalin kerjasama yang baik dalam hal strategi program pendidikan gratis serta sumber daya biaya yang memadai dalam menjalankan program pendidikan gratis.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pemahaman rumusan masalah dan kesimpulan yang dituliskan sebelumnya, penelitian ini menerangkan hal yang terkait sebagai berikut:

Pemerintah dan pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang program pendidikan gratis ini kepada seluruh lapisan masyarakat karena dengan adanya program pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setidaknya masyarakat dapat dibantu, sehingga dengan mudah mendapatkan pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah

Peningkatan sumber daya pengajar terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar harus ditingkatkan lagi, karena sumber daya tenaga pengajar sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

REFERENSI

- Arief. 2010. Peningkatan Mutu. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Asmoko, Hindri. 2010. Strategi Pemerintah. Jakarta: Bumi Aksara
- Brown. 2010. Capacity Bulding. Bandung: Grafindo Persada

- Dwiyanto. 2010. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Harakan, A. (2017). Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten Gowa. *ARISTO*, 5(1), 101-109.
- Kotler. 2011. Strategi Pemerintah.. Yogyakarta: Kanisius
- Morison. 2010. Peningkatan Kapasitas. Surabaya: Penerbi Andi
- Mustari, N. (2011). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto.
- Nurhayati . 2010. Perspektif Mikro Pendidikan. Yogyakarta: UGM Press
- Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1)PP.No 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas
- Rangkuti, P. 2012. Organisasi. Jakarta: Erlangga
- UU No 20 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Pendidikan Nasional
- UU No 32 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Pendidikan Publik Desentralisasi
- UUD 1945 Tentang Yakni Mencerdaskan Kehidupan Bangsa